

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pertengahan 1997, pembangunan di Indonesia terhenti karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan yang disebabkan pendapatan pemerintah berkurang, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Krisis ekonomi telah berhasil memunculkan kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejala sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara mamadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Halim (2014:267) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Rasio Efektivitas (Halim, 2014 : 267) analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efisiensi yaitu merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim 2010 : 234).

Menurut Halim (2008), rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul pengantar manajemen keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan, mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Menurut Halim (2008), rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Asli Daerah), antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggungjawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilikinya dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya bahwa daerah provinsi perlu didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (Undang-undang Nomor 22 tahun 1999), dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang selama 5 tahun terakhir (2018-2022), sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

***Kota Kupang Tahun 2015-2019***

<b>Tahun</b>	<b>(APBD) (Miliar Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Miliar Rupiah)</b>	<b>Presentase (%)</b>
2018	1.204.715.632.412,30	1.156.105.794.118,85	95,97
2019	1.193.807.700.620,38	1.169.535.197.600,75	97,97
2020	1.211.442.341.922,00	1.164.514.406.237,52	96,13
2021	1.148.840.306.941,00	1.128.428.149.265,37	98,22
2022	1.149.387.269.396,00	1.081.113.648.821,79	94,06

*Sumber Data: Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2018 sebesar Rp. 1.204.715.632.412,30, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.193.807.700.620,38, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.211.442.341.922,00, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.148.840.306.941,00, dan pada tahun 2022 jumlah pendapatan belanja daerah kota kupang penigkatan menjadi Rp. 1.149.387.269.396,00 . Untuk Perealisasian Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 realisasi kota kupang sebesar Rp. 1.156.105.794.118,85, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.169.535.197.600,75, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.164.514.406.237,52, pada tahun 2021 mengalami kembali penurunan menjadi Rp.

1.128.428.149.265,37, dan pada tahun 2022 jumlah realisasi pendapatan belanja daerah kota kupang berkurang menjadi Rp. 1.081.113.648.821,79. Sedangkan pada tingkat presentase anggaran pendapatan belanja daerah kota kupang 2018-2022 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997,42 ; A Halim , 2001,348). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka peneliti hendak mengajukan judul **“Analisis Efisiensi, Efektivitas, Pertumbuhan Dan Ketergantungan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Analisis Efisiensi Dan Pertumbuhan Serta Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Kupang ?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio efektivitas Belanja dan Pendapatan Kota Kupang ?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio kergantungan Pendapatan Daerah Kota Kupang ?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio efisiensi Belanja dan Pendapatan Kota Kupang ?

## **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Kupang
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio efektivitas Belanja dan Pendapatan Kota Kupang.

3. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio ketergantungan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
4. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio efisiensi Belanja dan Pendapatan Kota Kupang.

#### **1.4.2 MANFAAT**

Manfaat penelitian terdiri dari :

1. Manfaat akademik

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang manajemen terutama mengenai Pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah Manfaat Praktiks

2. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah Kota Kupang dapat digunakan untuk memberikan sumbangan berupa analisis pengelolaam keuangan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kemandirian sehingga dapat mewujudkan daerah otonomi yang sesungguhnya.